

# **INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2013**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, maka berikut ini diinformasikan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2013.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Parepare Tahun 2013 ini adalah merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Ruang lingkup pembahasannya mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

## **A. GAMBARAN UMUM KOTA PAREPARE**

Kota Parepare secara geografis terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah utara-selatan maupun arah timur-barat. Sesuai dengan arahan pengembangan wilayah, maka Kota Parepare ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW) untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan. Pemaknaan pusat pelayanan antar wilayah diterjemahkan oleh Pemerintah daerah Kota Parepare dalam visinya sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri, religius dan berkomitmen Lingkungan.

Dengan luas 99,33 Km<sup>2</sup>, Kota Parepare berada pada posisi 3°57'39" - 4°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24" - 119°43'40" Bujur Timur, dengan kondisi topografi secara umum terbagi dalam 2 (dua) morfologi, yakni; dataran dan perbukitan. Secara administratif, Kota Parepare terbagi dalam 4 (empat) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan.

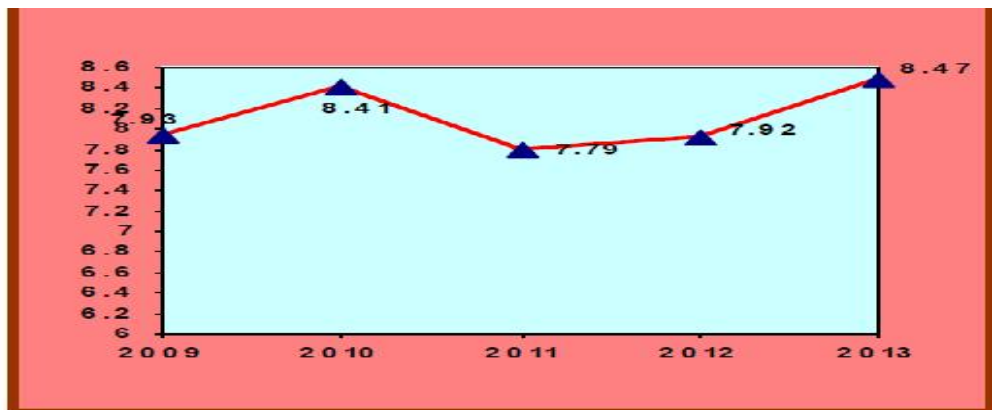
Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Parepare sebanyak 135.200 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 66.274 jiwa dan perempuan sebesar 68.926 jiwa.

Dari 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare, Kecamatan Soreang mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 45.551 jiwa. Disusul kemudian oleh Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 40.908 jiwa, Kecamatan Ujung sebanyak 33.570 jiwa, dan Kecamatan Bacukiki sebanyak 15.171 jiwa.

Persentase kepadatan penduduk Kota Parepare menurut kecamatan tahun 2013 adalah Kecamatan Soreang, yaitu 46,29 persen, dan yang terendah adalah Kecamatan Bacukiki, yakni sebesar 1,92 persen.

Penduduk Usia Kerja (penduduk yang berumur 15 tahun ke atas) yang ada di Kota Parepare Tahun 2013 berjumlah 92.345 orang yang terdiri dari 53.678 orang Angkatan Kerja dan 39.327 orang Bukan Angkatan Kerja. Tingkat pengangguran sebesar 2.276 orang atau 4,21 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Parepare tahun 2013 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kota Parepare mencapai angka 7,42 persen sedangkan di tahun 2013 telah mencapai angka 8,47 persen. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan ekonomi Parepare dapat dilihat pada grafik berikut :



PDRB perkapita Kota Parepare setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Selama tahun 2009-2013, PDRB perkapita Kota Parepare terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, PDRB Perkapita penduduk Kota Parepare sebesar Rp.12.782.990,02 meningkat di tahun 2010 dengan nilai Rp.13.893.980,91. Ditahun 2011 terus mengalami peningkatan menjadi Rp.15.881.650,54 hingga tahun 2012 menembus angka di atas 15 juta sebesar Rp.17.997.404,43 dan tahun 2013 mencapai angka Rp.20.502.729,16.

Untuk melihat keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia di suatu Negara atau wilayah, dapat diukur dengan menggunakan *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* atau *Human Development Index (HDI)*. Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) telah melaksanakan kerjasama pengkajian dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kinerja pembangunan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan Parameter IPM atau HDI, dengan menggunakan 3 (Tiga) indikator yaitu: i) Indeks Kesehatan, dengan pilihan

angka harapan hidup, ii) Indeks Pendidikan, dengan pilihan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, iii) Indeks Paritas Daya Beli. Hasil kajiannya telah dipublikasikan melalui penerbitan buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare Tahun 2013, dengan hasil sebagai berikut :

### **1. Indeks Kesehatan**

Indeks kesehatan yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup ( $e_0$ ). Pada tahun 2012 angka harapan hidup Kota Parepare tercatat sekitar 74,71 tahun, meningkat dibanding tahun 2011 yang besarnya sekitar 74,49 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kota Parepare semakin baik dalam kurun waktu 2011-2012. Indeks Kesehatan Kota Parepare tahun 2012 sebesar 82,85 persen masih lebih tinggi dibandingkan dengan Sulawesi selatan yang hanya sebesar 75,68 persen.

### **2. Indeks Pendidikan**

Indeks pendidikan terdiri dari dua unsur yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, komponen angka melek huruf pada tahun 2012 mengalami sedikit peningkatan dari 97,17 persen menjadi 97,33 persen. Sementara itu, indikator yang tidak kalah penting lainnya yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Parepare yang berumur 10 tahun ke atas pada tahun 2012 meningkat menjadi 9,88 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2011 sebesar 9,76 tahun.

### **3. Indeks Paritas Daya Beli**

Daya beli penduduk Kota Parepare pada tahun 2012 sekitar 646,40 ribu rupiah, sedangkan pada tahun 2011 sekitar 644,04 ribu rupiah. Sementara itu, rata-rata daya beli penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2012 sekitar 643,59 ribu rupiah, mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 640,30 ribu rupiah.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare pada tahun 2011 sekitar 78,19 mengalami peningkatan menjadi 78,63 pada tahun 2012. Posisi IPM Kota Parepare pada tahun 2012 berada pada peringkat ke 2 (dua) dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Sedangkan secara nasional, IPM Kota Parepare menduduki peringkat kesembilan belas.

## B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun 2013 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Parepare 2008-2013, dengan visi *“Terwujudnya Parepare sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri, Religius serta Berkomitmen Lingkungan”*.

1. *Bandar Madani* adalah kondisi sebagai sebuah kota yang didalamnya berlangsung kehidupan yang sejahtera dan berperadaban dengan dukungan sarana, prasarana dan fasilitas yang mencukupi. Citra Bandar Madani ditandai oleh pencapaian pada kesejahteraan dan peradaban yang mengkondisikan hidup yang bermartabat sesuai spirit zaman.
2. *Mandiri* adalah kondisi tatanan masyarakat yang berpendidikan, sehat, produktif, sadar kewajiban, dan berdaya. Citra mandiri ditandai oleh pencapaian kualitas manusia dalam hal pendidikan dan kesehatan, kemampuan memproduksi secara inovatif, menjalankan kewajiban sebagai warga negara dan masyarakat, serta mampu mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan dengan potensi dan sumberdaya yang ada.
3. *Religius* adalah kondisi tatanan masyarakat yang agamis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, cinta kerukunan dan kedamaian, saling menghargai dan toleran, serta menjunjung tinggi hak-hak sesama manusia.
4. *Berkomitmen Lingkungan* adalah kondisi tatanan masyarakat yang menghargai dan cinta terhadap lingkungan sebagai tempat hidup serta efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumberdaya alam.

Untuk mendukung visi tersebut, maka dirumuskan misi Pemerintah Kota yang diarahkan pada : *pertama*, mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat; *kedua*, mewujudkan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat; *ketiga*, mewujudkan kecukupan sarana, prasarana, infrastruktur dan fasilitas kota; *keempat*, mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan; *kelima*, mewujudkan tatanan masyarakat yang religius, toleran, tertib dan humanis; dan *keenam*, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2008 - 2013 terdiri dari: (1) Pengembangan Parepare sebagai Kota Jasa dan Niaga; (2) Pengembangan Parepare sebagai Kota Pendidikan dan Kota Sehat; (3) Pengembangan Parepare sebagai Kota Maju; (4) Pengembangan Parepare sebagai Kota Hijau; (5) Pengembangan Parepare

sebagai Kota Rohani; dan (6) Pengembangan Parepare sebagai Kota Pelayanan.

### **C. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DESENTRALISASI)**

Untuk mengetahui penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Parepare tahun 2013, berikut uraian capaian pelaksanaan program-program pembangunan menurut urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2008-2013.

#### **PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB**

##### **1. Penyelenggaraan Urusan Pendidikan.**

Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Pendidikan sebagai pelaksana urusan ini sebesar Rp.233.005.645.361,- dengan realisasi Rp.223.308.689.393,- atau 95,8 persen, yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, antara lain :

- a) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan rehabilitasi gedung SD/MI (DAK), penyediaan beasiswa SD dan SMP kepada siswa kurang mampu sebanyak 275 orang pemberian bantuan untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun secara gratis pada 133 sekolah, pemberian bantuan pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun pada 124 sekolah dan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir pada SD Negeri 20 dan SD Negeri 64 Parepare.
- b) Program Pendidikan Menengah yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu sebanyak 308 orang, meningkatkan kualitas dan kompetensi guru SMK melalui praktek kerja industri ke perusahaan diluar provinsi sebanyak 30 orang, penyelenggaraan ujian nasional jenjang SMA/SMK sebanyak 31 sekolah, pemberian kesejahteraan guru SMA Negeri 5 dan guru SMA Negeri 2 sebagai penyelenggara kelas khusus, pelaksanaan praktek kerja industri bagi siswa SMK untuk menimba pengalaman pada perusahaan di luar daerah sebanyak 222 orang dan penyelenggaraan program pendidikan gratis pada 31 sekolah.
- c) Program Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyediaan modul pembelajaran peserta program paket B setara SMP sebanyak 60 orang dan pelaksanaan pembelajaran untuk mengurangi angka putus sekolah setara SMA sebanyak 90 orang.

d) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembimbingan peserta hasil seleksi OSN tingkat provinsi, siswa SMP sebanyak 15 orang dan siswa SMA sebanyak 40 orang untuk mempersiapkan diri mengikuti olimpiade sains tingkat provinsi di Makassar, pembimbingan peserta hasil seleksi OSN tingkat nasional dan pembinaan dan kompetensi tenaga pendidik guru pembimbing siswa calon peserta hasil seleksi OSN tingkat kota sebanyak 60 orang.

## 2. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD.A. MAKKASAU dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.898.535.989,- dengan realisasi Rp.103.904.704.984,- atau 108,35 persen, yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan, antara lain :

- a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dilaksanakan dalam kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan tujuan untuk mendukung ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di seluruh puskesmas wilayah Kota Parepare.
- b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin yang terdata diseluruh Puskesmas wilayah Kota Parepare dan pengelolaan jaminan pelayanan kesehatan daerah (Jamkesda) yang terdata sebagai penerima bantuan Jamkesda.
- c) Program Pengembangan Lingkungan Sehat dilaksanakan dalam kegiatan penyehatan/pembinaan kesehatan lingkungan dengan tujuan untuk mengembangkan lingkungan sehat melalui data sanitasi yang ada di masyarakat.
- d) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dilaksanakan dalam kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk yang dilaksanakan di wilayah yang ada penderita DBD, pengadaan vaksin penyakit menular, pelayanan Kesehatan Haji berupa pemberian vaksin meningitis, pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV, pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi menular seksual (IMS), penyakit TB Paru dan penyakit TB Kusta.
- e) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dilaksanakan dalam kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas yang bertujuan

untuk kelengkapan sarana dan prasarana puskesmas wilayah Kota Parepare dan pengadaan sarana dan prasarana gedung laboratorium kesehatan daerah untuk menunjang kegiatan pemeriksaan di laboratorium kesehatan daerah.

- f) Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan pelayanan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) untuk melayani pasien warga Kota Parepare yang dirujuk di RSUD. A. MAKKASAU.
- g) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit dan pembangunan gedung RS.
- h) Program peningkatan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pengadaan obat-obatan, jasa pelayanan, pengadaan makan minum pasien dan alat-alat kedokteran umum.

### **3. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup**

Penyelenggara urusan ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.396.702.260,- dengan realisasi Rp.12.949.070.499,- atau 96,66 persen, yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan, antara lain :

- a) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan, pengawasan seluruh aktivitas masyarakat khususnya para pelaku usaha terkait dengan aturan-aturan pengelolaan lingkungan hidup dan pembentukan pembinaan 21 kelompok masyarakat peduli lingkungan.
- b) Program peningkatan pengendalian polusi yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair.
- c) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan dalam kegiatan Penataan RTH, yaitu terlaksananya pengawasan, penanaman dan pemeliharaan 1000 pohon pelindung/peneduh dan pemeliharaan taman kota.
- d) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dilaksanakan dalam kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan meliputi penyediaan alat-alat kebersihan dan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.

#### **4. Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum**

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang serta Pengawasan Bangunan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.71.323.867.605,- dengan realisasi anggaran Rp.48.571.152.161,- atau 68,10 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan, antara lain :

- a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. Pada tahun anggaran 2013 ini terdapat penambahan jalan dalam kondisi baik sekitar 3,38 KM, peningkatan jalan beton sepanjang 2.033 M dan pembangunan Jalan Beton Kompleks Kawasan Industri 130 M.
- b) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dengan kegiatan pembangunan/rehabilitasi Duiker sebanyak 4 unit, rehabilitasi Saluran/Drainase sepanjang 723,60 M, pembangunan drainase sepanjang 640,80 M dan pembangunan plat penutup selokan dengan panjang mencapai 323 M.
- c) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dengan capaian kinerja pembangunan talud sebanyak 3 unit atau panjang 162 M, pembangunan tanggul sebanyak 3 unit atau sepanjang 154 M dan pembangunan tanggul sepanjang 220 M.
- d) Program Pembinaan dan Konservasi Arsitektur Bangunan Tradisional dan Bersejarah dengan kelanjutan pembangunan Masjid Agung Parepare.
- e) Program pemeliharaan jalan umum yang terdiri dari pengadaan lampu jalan dengan sistem solar cell dan pengadaan kendaraan dinas Operasional skylift dan 2 unit motor.

#### **5) Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang**

Penyelenggaraan urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.10.092.367.150,- dengan realisasi anggaran Rp.8.985.960.382,- atau 89,04 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan, antara lain :

- a) Program peningkatan kawasan perkotaan dengan kegiatan pembangunan jalan lingkungan/lapin, jalan setapak (paving blok, rabat beton), saluran, penutup saluran, dan plat duiker.
- b) Program penataan dan rehabilitasi lingkungan pemukiman kumuh. Program ini merupakan kegiatan pembangunan jalan lingkungan/lapin,



jalan setapak ( paving blok, rabat beton ), saluran, penutup saluran, dan plat duiker di 22 Kelurahan sekota Parepare.

- c) Program perencanaan tata ruang, dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Ranperda Ruang Terbuka Hijau.
- d) Program pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, dilaksanakan dalam bentuk Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Parepare.

#### **6) Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan**

Penyelenggaraan urusan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.4.375.038.180,- dengan realisasi anggaran Rp.3.768.839.408,- atau 86,14 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan, antara lain :

- a) Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan koordinasi dan konsultasi yang efektif antara Fasilitator Kelurahan (FASKEL) dengan Bappeda, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyelenggaraan musrenbang, penyusunan dokumen penyusunan dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2013 dan dokumen KUA dan PPAS APBD tahun 2014 dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b) Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan kegiatan penyusunan indikator ekonomi daerah, terbentuknya tim yang mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di kota Parepare dan penyusunan Ranperda PEL.
- c) Program perencanaan sosial budaya dengan kegiatan penyusunan indeks pembangunan manusia dan penyusunan ranperda pengarusutamaan gender yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Parepare.
- d) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, dengan kegiatan eksplorasi pengayaan tanaman untuk penambahan koleksi tanaman di Kebun Raya Parepare, percepatan pembangunan sanitasi perkotaan dan koordinasi program pengembangan kota hijau.

#### **7) Penyelenggaraan Urusan Perumahan.**

Penyelenggaraan urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.6.247.314.700,- dengan realisasi anggaran

Rp.4.180.127.442,- atau 66,91 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, antara lain :

- a) Program peningkatan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan permukiman dengan kegiatan pemantauan dan penertiban pekerjaan bangunan, sosialisasi Perda Retribusi IMB Baru, Perda Bangunan dan Perda RTRW serta sosialisasi mengenai Garis Sempadan Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare, pendataan dan pengumpulan informasi mengenai jumlah rumah tidak layak huni atau rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
- b) Program peningkatan perumahan dan permukiman terdiri dengan kegiatan pengadaan jaringan air air bersih.

#### **8) Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Penyelenggaraan urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.3.295.370.750,- dengan realisasi anggaran Rp.2.764.097.814,- atau 83,88 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, pelatihan paskibraka, pelatihan aubade dengan hasil tersedianya pasukan paskibraka dan peserta aubade pada HUT RI.
- b) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan rehabilitasi sarana bermain Lapangan Andi Makkasau.

#### **9) Penyelenggaraan Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah**

Penyelenggaraan urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.627.580.000,- dengan realisasi anggaran Rp.560.581.250,- atau 89,32 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif dilaksanakan dalam kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat berupa peralatan menjahit sebanyak 12 paket, peralatan mesin bordir sebanyak 5 unit, peralatan catering sebanyak 50 paket dan peralatan salon sebanyak 10 paket.

- b) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dilaksanakan dalam kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat berupa peralatan usaha catering, peralatan usaha laundry (mesin cuci), dan peralatan usaha salon (kursi tata rias).
- c) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan koperasi dalam rangka peningkatan kualitas dan pengetahuan pengurus koperasi, sosialisasi undang-undang perkoperasian No. 17 Tahun 2012 dan penilaian kesehatan koperasi baik dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, dan kemandirian koperasi.

#### **10) Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.2.188.889.900,- dengan realisasi anggaran Rp.2.124.727.264,- atau 97,07 persen yang dilaksanakan dalam Program penataan administrasi kependudukan melalui kegiatan pengadaan sarana (blanko) KTP, KK dan berbagai jenis Akta Capil, penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Pindah (Masuk/ Keluar) dari Kota Parepare, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan.

#### **11) Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan**

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.4.321.343.750,- dengan realisasi anggaran Rp.4.155.133.365,- atau 96,15 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Kegiatan ini merupakan pengadaan peralatan laboratorium elektronik / teknik HP untuk penunjang pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kerja, pelatihan komputer, pelatihan las dan pelatihan menjahit dan proseeing pengolahan hasil pertanian.
- b) Program perlindungan pengembangan lembaga tenaga kerja. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pemerikasan dan pengujian objek K3, pemberdayaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, Sosialisasi Upah Minimum Provinsi bagi Pekerja dan Pengusaha dan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

## **12. Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan**

Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.2.567.045.900,- dengan realisasi anggaran Rp.2.424.596.329,- atau 94,45 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dengan kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, pengawasan mutu dan keamanan pangan dan pendataan statistik produksi (ketersediaan), distribusi, dan konsumsi masyarakat terhadap produk-produk atau komoditi utama.
- b) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dengan kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dan gerakan diversifikasi Konsumsi Pangan.
- c) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan dengan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan, peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan dan pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.

## **13) Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera**

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.4.448.344.800,- dengan realisasi anggaran Rp.3.553.326.341,- atau 87,30 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan kegiatan pelatihan bagi paralegal (pendamping) korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) Program keluarga berencana dengan kegiatan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin serta peningkatan partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi.
- c) Program pengembangan model operasional BKB-posyandu-padu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penilaian lomba masyarakat berprestasi dengan melibatkan para kader institusi (PPKBD, BKL, Penyuluh KB, UPPKS dan Klinik).

#### **14) Penyelenggaraan Urusan Perhubungan**

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.4.895.086.500,- dengan realisasi anggaran Rp.4.792.737.030,- atau 97,91 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ berupa rehabilitasi Pos permanen Retribusi Lumpue, dan rehab Pos Non Permanen 4 (empat) unit di Check Point Lakessi, Terminal Pembantu soreang dan Terminal Pembantu Lapadde, pengadaan rambu-rambu Jalan dan alat listrik Electronic dan pengadaan genset.
- b) Program Peningkatan pelayanan Angkutan, yaitu dengan melakukan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang, melakukan pemeriksaan perlengkapan izin Operasional kendaraan dan penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan.

#### **15) Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika**

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.2.263.121.000,- dengan realisasi anggaran Rp.2.168.799.605,- atau 95,83 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan kerjasama Informasi dengan mas media berupa pelayanan internet keliling ditiap kecamatan, penyediaan bank data Pemerintah Daerah dan media informasi kepada masyarakat melalui Website Pemerintah Kota Parepare dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah melalui media TV Lokal dan media lainnya.

#### **16) Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.6.139.375.000,- dengan realisasi anggaran Rp.5.939.070.786,- atau 96,74 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan kegiatan pembentukan tim koordinasi anggota intelejen daerah (KOMINDA) serta penertiban dan penegakan Peraturan Daerah.
- b) Program pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan penyusunan data base partai politik, forum komunikasi dan pertemuan berkala Ormas, LSM dan Pemda, sosialisasi tentang Pendidikan Pemuda

Perspektif Gender dan Rakorda pengamanan pilkada Walikota dan Wakil Walikota Parepare.

- c) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dilaksanakan dalam bentuk pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dan meningkatkan jumlah pos kamling di kota Parepare.

## **20) Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian**

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) SKPD, diantaranya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, 4 (Empat) Kecamatan, Kantor Pelayanan Perizinan, Dinas Pendapatan Daerah dan Sekretariat Korpri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.121.656.710.637 dan realisasi sebesar Rp.110.460.736.979,81 atau 90,80% dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- a) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan capaian pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda dan Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan.
- b) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan yaitu Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, publikasi peraturan perundang-undangan/penyusunan himpunan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota dan Penyusunan Rancangan dengan Metode RIA.
- c) Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa dengan kegiatan visualisasi kegiatan Pemerintah Kota Parepare, penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SMS Centre) dan kontrak halaman Bandar Madani dan pembuatan Film Dokumentasi Potensi Kota Parepare.
- d) Program Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan dengan kegiatan amaliah Ramadhan, pengiriman kafilah STQ Tingkat propinsi ke Makassar, Festival Anak Saleh Indonesia Tingkat Kota, Pelatihan Pembinaan dan

Pengawasan NAPZA, Dzikir dan taushiyah Muharram dan pengadaan Billboard/Reklame NAPZA.

- e) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Walikota, rehabilitasi berat ruang Kerja Wakil Walikota dan Rehabilitasi Ringan Ruang Kerja Walikota, pembangunan Gazebo Rujab Sekretaris Daerah, pembangunan parkir Bina Lipu, pengadaan tempat khusus merokok dan fasilitasi perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok.
- f) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Operasional Satuan Tugas Kerumahtanggaan Pemerintah Kota Parepare.
- g) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan, penyelenggaraan kegiatan administrasi/ketatausahaan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berkaitan dengan perbendaharaan dan kerugian uang negara/daerah dan Bintek PP 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi daerah.
- h) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan penyusunan LAKIP dan RKT, penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- i) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan penomoran dan inventarisasi aset, penatausahaan barang milik daerah, penyusunan standar satuan harga dan penyelenggaraan sistem informasi pertanahan.
- j) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan pendataan/Penilaian Obyek dan Subyek PBB, pemberian Hadiah/Stimulus Kepada Pembayar awal PBB, Intensifikasi PAD, Intensifikasi PBB, BPHTB, sosialisasi Perda-Perda pajak dan retribusi dan sistem komputerisasi PBB.
- k) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. dengan kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah, Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat/tokoh agama, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan publikasi peraturan perundang-undangan.

- l) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
- m) Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS, pemberian bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, pengelolaan system Informasi Kepegawaian Daerah dan penyelenggaraan Rapat Kerja Tekhnis (RAKERNIS) Kepegawaian.
- n) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan dengan kegiatan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat, Pembinaan lmtag dan organisasi kemasyarakatan, peningkatan pelayanan terpadu masyarakat tingkat RT/RW, Imam mesjid dan Kelurahan, Intensifikasi penagihan PBB dan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan.
- o) Program peningkatan pelayanan perizinan satu atap, dilaksanakan dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan. Pada Tahun 2013 Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare mendapat penghargaan sebagai Kota terbaik “Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Kota Terbaik Tahun 2013”.
- p) Program fasilitas pindah/purna tugas PNS yang dilaksanakan dalam kegiatan prosesi pemakaman jenazah anggota KORPRI (PNS lingkup pemerintah kota).

## **21) Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Urusan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.453.800.400 dan realisasi sebesar Rp.2.237.048.679 atau 91,17 persen dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- a) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pelatihan perencanaan pembangunan bagi kader pemberdayaan masyarakat (kpm), insentif kader pemberdayaan masyarakat (kpm), penataan sanitasi rumah miskin dan jamban keluarga.
- b) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan bagi lembaga kemasyarakatan.



## **22) Penyelenggaraan Urusan Sosial**

Urusan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.926.053.400 dan realisasi sebesar Rp.2.312.669.069 atau 79,04 persen dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- a) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.
- b) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatan antara lain penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, rehabilitasi Taman Makam Paccekke, Makam Kusuma, makam Abbanuangnge dan Monumen Korban 40.00 Jiwa.

## **23) Penyelenggaraan Urusan Statistik**

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.660.000 dan realisasi sebesar Rp.76.186.950 atau 88,94 persen dengan pelaksanaan program pengembangan data/informasi/statistik daerah, direalisasikan dalam bentuk kegiatan penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah dan penyusunan dan pengumpulan data PDRB.

## **24) Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan**

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.552.945.000 dan realisasi sebesar Rp.1.495.097.416 atau 96,27 persen dengan pelaksanaan program antara lain :

- a) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.
- b) Program peningkatan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan kegiatan pengadaan buku perpustakaan dengan jumlah 457 judul/1.626 eksemplar, bantuan buku dari Perpustakaan Nasional RI sebanyak 73 judul/152 eksemplar dan bantuan dari Balai Pelestarian Budaya Makassar sebanyak 13 judul/13 eksemplar, Operasional mobil perpustakaan keliling dan pengadaan mesin foto copy 1 (satu) unit.

## **25) Penyelenggaraan Urusan Pertanian dan Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan**

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.650.442.340 dan realisasi sebesar Rp.9.808.538.739 atau 66,95 persen dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- a) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak serta pengawasan perdagangan ternak antar daerah. Capaian pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya vaksin dan obat-obatan, pengawasan perdagangan ternak.
- b) Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan kegiatan penyediaan alat angkutan benih/bibit dan penyediaan sarana dan prasarana pembenihan/pembibitan sebanyak 7 jenis, tersusunnya data pengelolaan statistik pertanian dan perkebunan dan tersedianya sarana dan prasarana operasional bidang pertanian/perkebunan.
- c) Program pemanfaatan sumber daya hutan dengan kegiatan pemeliharaan kawasan hutan JompiE dan pemeliharaan kawasan hutan Alitta I dan II telah terealisasi berupa pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan tanaman aren dan tanaman spathodea sebanyak 1.500 batang.
- d) Program peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dengan output kegiatan adalah terlaksananya program International Fund for Agriculture Development (IFAD).

## **26) Penyelenggaraan Urusan Pariwisata**

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp.410.187.000 dan realisasi sebesar Rp.330.775.700 atau 80,64 persen dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- a) Program pengembangan pemasaran pariwisata, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pelaksanaan pemilihan duta Pariwisata kota Parepare dan pelaksanaan promosi pariwisata pada kegiatan Event Tourism Investment and Trade (TIT) expo 2013 di Yogyakarta, pawai seni dan budaya nuasantara di Istana Negara.
- b) Program pengembangan destinasi pariwisata, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pengembangan obyek pariwisata unggulan yang

diwujudkan dengan melaksanakan Festival Salo Karajae yang melibatkan Daerah-Daerah di Ajattapareng.

#### **27) Penyelenggaraan Urusan Perdagangan dan Perindustrian**

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.646.993.000,- dan realisasi sebesar Rp.4.152.526.233,- atau 89,36 persen dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- a) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah pengawasan harga bahan pokok dan bahan strategis di Kota Parepare, pelaksanaan operasi pasar sembako.
- b) Program penataan struktur industri dengan kegiatan pemberian peralatan perbengkelan kepada 16 orang pelaku usaha di bidang jasa bengkel las.
- c) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial dengan kegiatan keikutsertaan dalam penyelenggaraan pameran dekranas ditingkat nasional, pemberaian bantuan peralatan usaha bagi IKM, pelatihan dan bantuan peralatan pertukangan kayu kepada 45 orang pelaku usaha pertukangan kayu, pemberian peralatan pertukangan batu diberikan kepada 40 orang pelaku usaha pertukangan batu.

#### **D. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Selain menyelenggarakan urusan desentralisasi, Pemerintah Kota Parepare juga menyelenggarakan tugas pembantuan yang berasal dari dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2013 Pemerintah Kota Parepare mendapatkan bantuan pendanaan melalui 5 (lima) SKPD untuk menjalankan tugas pembantuan tersebut, yaitu :

##### **1) Dinas Tenaga Kerja**

Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk program penempatan dan perluasan kesempatan kerja dengan kegiatan Padat Karya Infrastruktur. Dari jumlah anggaran dana pembantuan sebesar Rp. 799.658.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.796.787.200,- (99,64 persen) berupa pembuatan jalan tanah di Kelurahan Wattang Bacukiki, Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki.

## **2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

Tugas Pembantuan yang diterima dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.937.180.750,- atau sebesar 97,95 persen dalam bentuk Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melalui kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pembangunan pasar tradisional/pasar kuliner).

## **3) Dinas kesehatan**

Tugas Pembantuan yang diterima dari kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp.718.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.717.600.000 atau 99,83 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Bantuan operasional kesehatan dengan kegiatan Surveilans (Gizi, KIA, Imunisasi, Penyakit Menular dan Tidak Menular) dan pelayanan di posyandu.

## **4) RSUD A. MAKKASAU**

Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp.20.000.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.694.194.000,- atau 98,47 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan keluarga berencana.

## **5) Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan**

Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan unit organisasi adalah Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.973.170.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.721.658.387 atau 91,54 persen. Program yang dilaksanakan adalah Program pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha dengan capaian terlaksananya pembangunan kapasitas masyarakat pesisir serta peningkatan penataan dan pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan.

## **E. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan diantaranya meliputi kerjasama daerah dengan instansi vertikal di daerah, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah .

### **1) Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga**

- a) Perjanjian Belanja Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Parepare.
- b) Perjanjian Belanja Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Parepare.
- c) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan General Manager PT. PELINDO tentang Pengoperasian Eks Dermaga Ternak di Cappa Ujung Kota Parepare.
- d) Perjanjian Belanja Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan BEM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMSIR Kota Parepare.
- e) Perjanjian Belanja Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kota Parepare.

### **2) Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah**

Berkaitan dengan koordinasi dengan instansi vertikal yang terdiri dari: Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Selain itu, juga telah terbentuk Komunitas Intelegen Daerah (Kominda), serta Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Parepare dengan tujuan utama pembentukan forum ini adalah untuk terwujudnya optimalisasi hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama masing-masing.

### **3) Pembinaan Batas Wilayah**

Kebijakan yang ditempuh untuk percepatan proses penyelesaian masalah batas wilayah antara Kota Parepare dengan kabupaten Sidrap dan Kota Parepare dengan Kabupaten Pinrang dititikberatkan pada upaya

mewujudkan batas wilayah yang jelas dan pasti baik secara yuridis maupun fisik dilapangan. Dengan hal tersebut Pemerintah Kota Parepare menyarankan kepada Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi dan mempertemukan tiga daerah (Pinrang, Sidrap dan Parepare) untuk dibahas bersama. Selanjutnya solusi penyelesaian dibuktikan dengan dokumen sebagai tanda bukti yang dimiliki masing-masing daerah.

#### 4) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Selama tahun 2013 telah terjadi bencana angin kencang/putting beliung yang mengakibatkan 679 rumah warga mengalami kerusakan baik rusak berat maupun ringan. Untuk penanggulangan dampak bencana dianggarkan anggaran sebesar Rp.1.250.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.250.000.000,- sebagai bantuan anggaran untuk perbaikan rumah dan lain-lain peruntukannya.

#### 5) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kota Parepare sebagai kota yang basis masyarakatnya heterogen mampu menjaga ketentraman dan ketertiban umum dari segala konflik yang berpotensi terjadi. Penguatan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat, antar pemuka agama, serta peran aktif masyarakat akan terus dikedepankan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum.

## **F. PENUTUP**

Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dijelaskan dalam laporan ini, sesungguhnya adalah merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalin bersama sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare, masih terdapat banyak kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 ini kami publikasikan untuk diketahui oleh masyarakat Kota Parepare pada khususnya dan oleh seluruh warga Negara Indonesia pada umumnya. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, saran pendapat ataupun tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dapat menyampaikan melalui SMS CENTRE Pengaduan Masyarakat 081-241350077 atau berkunjung langsung pada

kantor kami melalui Bagian Hubungan Masyarakat dan atau pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Parepare Jl. Jenderal Sudirman Nomor 78, Telepon 0421-21157 psw. 230, 231,207,214 Fax 0421-21090. Untuk mendapatkan informasi secara mendetail dan selengkapnya mengenai Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Parepare Tahun 2013 dapat dibuka melalui website Pemda Kota Parepare ([www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)).

*Sekian dan Terima Kasih!*

**WALIKOTA PAREPARE,**

**TTD**

**H.TAUFAN PAWE, SH, MH**